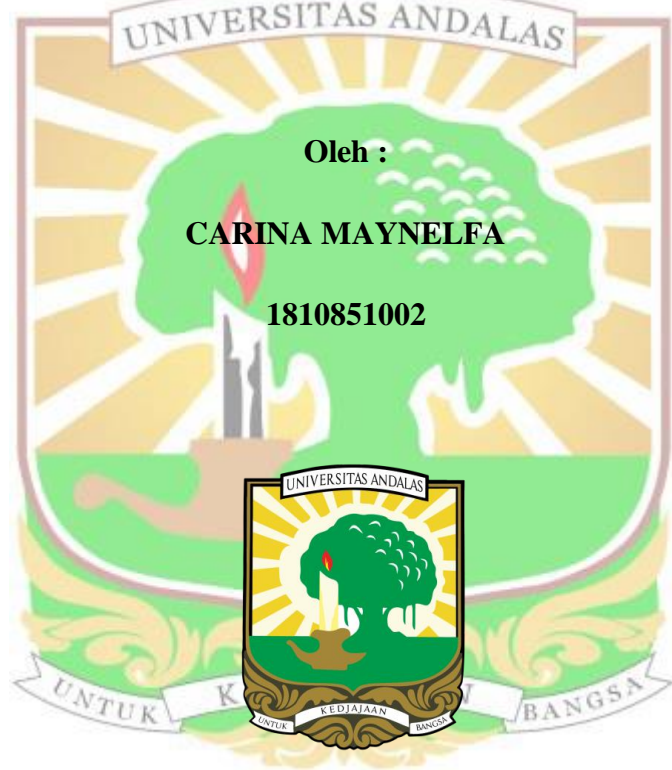


IMPLEMENTASI CITES OLEH INDONESIA DALAM PERDAGANGAN HIU MARTIL DAN HIU SUTRA

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Universitas Andalas



Pembimbing I : Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si

Pembimbing II : Silvi Cory, S.Pd, M.Si

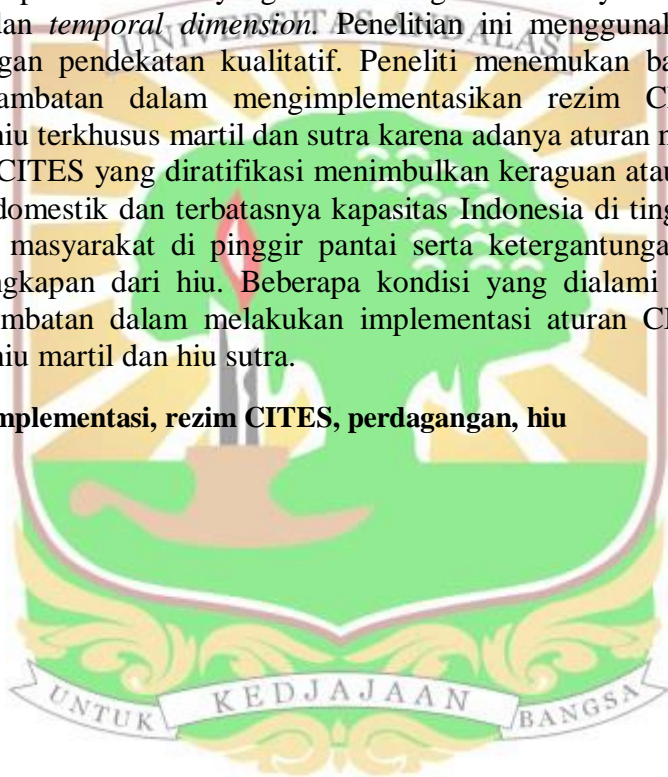
**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai berbagai hambatan yang dialami oleh Indonesia pada saat mengimplementasikan aturan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) mengenai perlindungan hiu yang masuk ke daftar Apendiks II. Hiu martil dan hiu sutra merupakan jenis hiu yang masuk ke daftar Apendiks II pada tahun 2013 dan 2016. Indonesia telah meratifikasi CITES dari tahun 1978 hingga kini masih menjalankan aturan CITES. Berbagai regulasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan tangkapan hiu untuk diperdagangkan. Terjadi peningkatan tangkapan dan perdagangan hiu meskipun sudah melakukan berbagai upaya. Hambatan yang dialami oleh Indonesia diteliti menggunakan konsep dari Abram Charles dan Antonio Handler Chayes yaitu kepatuhan rezim yang memiliki tiga indikator yaitu *ambiguity*, *lack of capacity*, dan *temporal dimension*. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa Indonesia mengalami hambatan dalam mengimplementasikan rezim CITES terhadap perlindungan hiu terkhusus martil dan sutra karena adanya aturan nasional turunan dari konvensi CITES yang diratifikasi menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan dalam aturan domestik dan terbatasnya kapasitas Indonesia di tingkat pendidikan dan teknologi masyarakat di pinggir pantai serta ketergantungan para nelayan pada hasil tangkapan dari hiu. Beberapa kondisi yang dialami oleh Indonesia merupakan hambatan dalam melakukan implementasi aturan CITES terkhusus perlindungan hiu martil dan hiu sutra.

Kata Kunci : implementasi, rezim CITES, perdagangan, hiu



ABSTRACT

This research aims to analyze the obstacles faced by Indonesia when implementing Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) rules regarding the protection of sharks that are listed in Appendix II. Hammerhead sharks and silk sharks are the types of sharks that were listed in Appendix II in 2013 and 2016. Indonesia has ratified CITES from 1978 until now it is still implementing CITES rules. Various regulations have been made by the government to show its seriousness in dealing with the problem of catching sharks for trade. There has been an increase in shark catches and trade despite various efforts. The obstacles experienced by Indonesia were analyzed using the concept of Abram Charles and Antonio Handler Chayes, namely regime compliance which has three indicators, namely ambiguity, lack of capacity, and temporal dimension. This study uses a descriptive methodology with a qualitative approach. The researcher found that Indonesia experienced obstacles in implementing the CITES regime for the protection of sharks, especially hammerheads and silks because of the national rules derived from the ratified CITES convention causing doubts or ambiguity in domestic regulations and Indonesia's limited capacity at the level of education and technology for coastal communities as well and also fishermen's dependence on haul from sharks. Several conditions experienced by Indonesia are obstacles in implementing CITES rules, especially the protection of hammerhead sharks and silk sharks.

Keywords: *implementation, regime CITES, trade, sharks*

